

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Fenomena perubahan iklim yang semakin meluas salah satunya disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca. Permasalahan perubahan iklim yang semakin meluas mendorong negara-negara di dunia untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menangani fenomena tersebut. Salah satunya melalui kerjasama bilateral seperti yang dilakukan Indonesia Jepang. Kerjasama Indonesia dan Jepang melalui (JICA) yang diinisiasi melalui pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan salah satu cara dimana negara penerima dapat mewujudkan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan negaranya dengan adanya bantuan luar negeri ini tentunya negara berkembang akan merasa terbantu dalam mewujudkan tujuannya tersebut. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi dari bantuan yang diberikan oleh Jepang terhadap Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca, dalam memberikan bantuan luar negerinya melalui *Cool Earth Partnership* Jepang memberikan suatu program pinjaman untuk melaksanakan upaya kerjasama melalui *policy matrix* yang terdiri dari mitigasi, adaptasi, dan isu lintas sektoral.

Proses implementasi dari bantuan yang telah diberikan oleh Jepang kepada Indonesia tentu berdampak kepada beberapa pengembangan dari sektor-sektor adaptasi dan mitigasi, seperti dibentuknya proyek manajemen sumber daya air di 12 provinsi diantaranya Aceh, Sumatra Utara, Yogyakarta, dan pada mitigasi salah satunya realisasi program konservasi dan restorasi lahan gambut di kawasan Kalimantan Tengah dan Riau, lalu kemudian pada lintas sektoral salah satunya pelaksanaan RAN-PI dan RAN GRK. Perencanaan tersebut disusun sebagai langkah strategis dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca nasional.

Melalui proyek ini kita dapat melihat sejauh mana mekanisme *policy matrix* dapat berpengaruh terhadap penurunan emisi di Indonesia. Dalam hasil pemantauan emisi pada periode 2008-2012, tingkat emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan bersifat fluktuatif dan dalam beberapa tahun berada di atas tingkat Business-as-Usual. Hal

**Liya Sundari, 2021**

**BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA DI INDONESIA MELALUI PROGRAM COOL EARTH PARTNERSHIP PERIODE 2008-2012**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

itu terlihat dari jumlah emisi pada tahun 2012 yang meningkat 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Walaupun banyak aktivitas dan kegiatan yang sudah dilakukan guna menekan tingkat deforestasi dan degradasi hutan melalui beberapa hal seperti, pekerjaan restorasi lahan gambut, pelaksanaan peralihan proyek yang menggunakan energi terbarukan dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk pencegahan perubahan iklim oleh instansi dan lembaga terkait. Namun pada nyatanya capaian yang diberikan belum maksimal untuk meredam laju jumlah emisi masih tinggi.

Jika dikaji dengan teori kerjasama bilateral, proyek ini adalah sebuah upaya yang digunakan kedua negara dengan harapan mendapatkan keuntungan bagi negara Jepang dan Indonesia serta untuk memenuhi kepentingan bersama. Namun kenyataannya pada kerjasama ini, keuntungan masih belum dapat tercapai secara maksimal. Karena walaupun proyek pada sektor *policy matrix* yang terdiri dari mitigasi, adaptasi, dan lintas sektoral telah diterapkan, hasil perhitungan menunjukkan besarnya jumlah emisi yang setiap tahun cenderung meningkat. Kurangnya maksimalnya capaian dalam proyek ini disebabkan karena tidak seluruh program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana, dalam implementasi pada sub sector lintas sektoral ini terdapat masalah dimana adanya target untuk pengembangan peningkatan koordinasi kebijakan perubahan iklim yang terhubung dengan perencanaan dan anggaran nasional, tidak berjalan sesuai target, dalam pelaksanaan target tersebut, terdapat beberapa hambatan terkait pengawasan, penetapan target, dan verifikasi hasil yang tidak sepenuhnya teratasi oleh pihak-pihak terlibat. Sehingga pihak Jepang memutuskan untuk memberhentikan bantuan pada tahun 2010, kurangnya koordinasi dan monitoring dari pihak Indonesia yaitu BAPPENAS dinilai kurang memberikan koordinasi mengenai progres bantuan, hal ini juga dikarenakan masih belum terintegrasinya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai urusan progress implementasi bantuan, sehingga pihak JICA tidak bisa menganalisa pencapaian dan sulit untuk menentukan bantuan lanjutan. Pada dasarnya suatu kerjasama lingkungan dilakukan melalui upaya mitigasi, adaptasi dalam mencegah perubahan iklim yang diakibatkan emisi grk, dan terdapat pola kerjasama lingkungan dimana kerjasama

**Liya Sundari, 2021**

**BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA DI INDONESIA MELALUI PROGRAM COOL EARTH PARTNERSHIP PERIODE 2008-2012**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Jepang dan Indonesia ini masih belum optimal, karena dalam penerapannya kerjasama lingkungan terdapat unit analisis, mutual interest, dan partisipasi. Namun ternyata dalam penerapan masih kurang partisipasi dan dukungan tidak hanya melibatkan dari pemerintah pusat saja.

Dapat disimpulkan, implemmentasi bantuan luar negeri *Cool Earth Partnership* dalam kerja sama bilateral di bidang lingkungan antara Pemerintah Jepang melalui JICA dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca guna mencegah perubahan iklim dengan penerapan *policy matrix* belum optimal. Terlihat dengan proses kerja sama yang bergerak linear, kurang melibatkan aktor pemerintah daerah dan masyarakat, serta kurangnya koordinasi pemerintah pusat terhadap rencana ataupun target untuk pengembangan program kerja sama tersebut kedepannya. Hal ini juga membuktikan bahwa konsep kerjasama lingkungan di Indonesia terlihat sudah dijalankan dengan adanya beberapa kerjasama internasional berupa pinjaman, teknis, dan hibah yang kemudian dijalankan di beberapa kota di Indonesia guna melindungi sektor-sektor strategis di Indonesia dengan upaya mitigasi, dan adaptasi yang ramah lingkungan.

## 6.2 Saran

Proyek bantuan luar negeri Jepang dalam upaya penurunan emisi diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, karena untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Indonesia sebagai negara berkembang yang membutuhkan dana dan dukungan dari Jepang diharapkan dapat memberikan capaian yang memuaskan guna membuktikan kepada Jepang dan dunia internasional bahwa Indonesia sebagai negara berkembang mampu mencapai target penurunan emisi dan menegaskan kontribusi besar Indonesia dalam isu lingkungan. Untuk mendukung semua itu, Indonesia harus memiliki kesiapan yang matang dalam skala nasional guna implementasi seluruh sektor dalam *policy matrix*. Perbaikan dan pengembangan struktur dan fungsi dan meningkatkan partisipasi kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu untuk mendukung terwujudnya kepentingan Indonesia dalam kerjasama lingkungan dimasa depan, Indonesia harus memperkuat aturan

Liya Sundari, 2021

**BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA DI INDONESIA MELALUI PROGRAM COOL EARTH PARTNERSHIP PERIODE 2008-2012**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

hukum lingkungan yang ada dan meningkatkan dan meningkatkan rangkaian regulasi, kegiatan, tujuan, dan biaya yang lebih matang.

Penelitian ini secara tidak langsung juga menyadarkan penulis bahwa dalam kata “hubungan internasional”, negara hanya sebagai perwakilan suatu negara saja. Untuk membuat negara dapat diterima sebagai perwakilan yang mewakili suatu negara di forum internasional, keterlibatan aktor-aktor lainnya sangat dibutuhkan, khususnya Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah dapat lebih cepat dan tanggap dalam menyetujui persoalan masyarakat yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah jugalah yang dapat lebih bergerak secara efektif dan efisien untuk mendorong masyarakat suatu negara memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara tersebut.

**Liya Sundari, 2021**

***BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA DI INDONESIA MELALUI PROGRAM COOL EARTH PARTNERSHIP PERIODE 2008-2012***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]